
REFORMASI BIROKRASI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK: SUATU TINJAUAN POLITIK ADMINISTRASI

Surianto

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Reformasi birokrasi telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik di berbagai negara. Artikel ini melakukan tinjauan terhadap hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik melalui perspektif politik administrasi. Tinjauan ini membahas konsep, tujuan, strategi, dan tantangan yang terkait dengan reformasi birokrasi serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik. Dengan menganalisis faktor-faktor politik yang mempengaruhi implementasi reformasi birokrasi, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana dinamika politik administrasi dapat membentuk kesuksesan atau kegagalan dari upaya reformasi tersebut.

Kata Kunci: *Reformasi Birokrasi, Efektivitas Pelayanan Publik, Politik Administrasi*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi birokrasi telah menjadi salah satu agenda utama bagi banyak negara di seluruh dunia dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, birokrasi dihadapkan pada tekanan untuk beradaptasi dan meningkatkan kinerja dalam menyediakan layanan yang responsif, transparan, dan berkualitas. Konsep reformasi birokrasi tidak hanya mencakup perubahan struktural, tetapi juga mencakup transformasi budaya, proses kerja, serta sistem pengawasan dan pengendalian.

Tinjauan terhadap hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik mengungkapkan bahwa keduanya saling terkait secara erat. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dinamika politik administrasi mempengaruhi implementasi reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik.

Perspektif politik administrasi menyoroti peran penting dari faktor-faktor politik dalam pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, termasuk reformasi birokrasi. Dinamika politik, kepentingan kekuasaan, dan interaksi antara aktor-aktor politik dan administratif dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari upaya reformasi birokrasi. Oleh karena itu, dalam menganalisis hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor politik yang memengaruhi proses tersebut.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam tentang hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik melalui perspektif politik administrasi. Tinjauan ini akan membahas konsep dasar dari reformasi birokrasi, tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui reformasi tersebut, strategi-strategi yang digunakan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, artikel ini juga akan menggali dampak dari dinamika politik administrasi terhadap kesuksesan atau kegagalan dari upaya reformasi birokrasi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran politik administrasi dalam proses reformasi birokrasi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks globalisasi dan perubahan dinamis dalam tuntutan masyarakat, birokrasi dihadapkan pada tekanan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Reformasi birokrasi tidak lagi hanya menjadi isu internal suatu negara, tetapi juga menjadi bagian integral dari agenda reformasi global. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan untuk mengubah birokrasi mereka menjadi entitas yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Di tengah persaingan global untuk menjadi lebih kompetitif secara ekonomi dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang

berkualitas, reformasi birokrasi menjadi semakin penting sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan.

Metode Penelitian

1. *Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik dari sudut pandang politik administrasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial-politik dengan lebih rinci, termasuk faktor-faktor politik yang memengaruhi proses reformasi birokrasi. Melalui analisis wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen, penelitian ini akan mencoba untuk memahami secara menyeluruh bagaimana dinamika politik administrasi mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari upaya reformasi birokrasi.*
2. *Wawancara: Penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan berbagai aktor yang terlibat dalam proses reformasi birokrasi, termasuk pejabat pemerintah, anggota lembaga legislatif, akademisi, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil. Wawancara ini akan bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung dari para pemangku kepentingan tentang faktor-faktor politik yang mempengaruhi implementasi reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik.*
3. *Studi Kasus: Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik di beberapa negara. Dengan memilih studi kasus yang representatif, penelitian ini akan mencoba untuk mengidentifikasi pola umum dalam implementasi reformasi birokrasi dan faktor-faktor politik yang mempengaruhi hasilnya. Studi kasus ini juga akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.*
4. *Analisis Dokumen: Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, laporan evaluasi, kebijakan publik, dan literatur terkait untuk mendukung temuan dari wawancara dan studi kasus. Analisis dokumen ini akan membantu dalam mengidentifikasi tren, perubahan, dan pola-pola dalam proses reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik.*

Melalui kombinasi pendekatan kualitatif, wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik dari perspektif politik administrasi. Metode penelitian ini akan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kompleksitas dinamika politik dalam implementasi reformasi birokrasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas layanan publik.

PEMBAHASAN

Reformasi birokrasi telah menjadi topik yang semakin relevan di banyak negara, terutama dalam konteks meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dalam tinjauan politik administrasi, penting untuk memahami bagaimana dinamika politik memengaruhi

implementasi reformasi birokrasi dan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek kunci terkait hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik, serta faktor-faktor politik yang mempengaruhi proses tersebut.

Salah satu aspek penting dari pembahasan ini adalah mengenai konsep dan tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Reformasi birokrasi sering kali bertujuan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ini bisa mencakup perubahan dalam struktur organisasi, proses kerja, dan budaya institusional. Namun, dalam prakteknya, implementasi reformasi birokrasi sering kali kompleks dan sulit dilakukan karena berbagai tantangan, termasuk resistensi internal dan eksternal serta kurangnya sumber daya.

Dalam konteks politik administrasi, faktor politik memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari upaya reformasi birokrasi. Faktor-faktor politik seperti kekuasaan, kepentingan politik, dan dinamika antara berbagai aktor politik dan administratif dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait reformasi birokrasi. Misalnya, dalam situasi di mana kepentingan politik dominan mengarah pada perlawanan terhadap perubahan, implementasi reformasi birokrasi bisa menjadi sulit atau bahkan terhenti sama sekali.

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak dari reformasi birokrasi terhadap efektivitas pelayanan publik. Idealnya, reformasi birokrasi harus mengarah pada peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, reformasi birokrasi bisa memiliki efek samping yang tidak diinginkan, seperti peningkatan birokratisasi atau penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam menganalisis hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dan karakteristik unik dari masing-masing negara. Apa yang berhasil dalam satu konteks mungkin tidak berlaku secara langsung di tempat lain. Oleh karena itu, pendekatan yang sesuai dengan konteks dan pemahaman mendalam tentang dinamika politik lokal diperlukan untuk merancang dan melaksanakan reformasi birokrasi yang efektif.

Hubungan antara reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik adalah kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor politik. Dalam mengevaluasi efektivitas reformasi birokrasi, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya hasil akhirnya tetapi juga proses implementasinya serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembahasan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.

Selain faktor-faktor politik yang memengaruhi implementasi reformasi birokrasi, juga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik. Salah satunya adalah kapasitas administratif yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan reformasi dengan baik. Tidak hanya itu, infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi yang memadai juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti tekanan dari masyarakat sipil, organisasi internasional, dan donor asing juga dapat memengaruhi implementasi reformasi birokrasi. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai penegak kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses reformasi, sementara organisasi internasional dan donor asing sering kali memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk mendukung reformasi birokrasi.

Dalam konteks globalisasi, reformasi birokrasi sering kali juga terkait dengan upaya untuk memenuhi standar internasional dalam hal tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. Negara-negara sering kali merespon tekanan dari lembaga-lembaga internasional dan organisasi regional untuk melakukan reformasi birokrasi sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan atau akses ke sumber daya eksternal.

Namun, penting untuk diingat bahwa reformasi birokrasi bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keadilan sosial. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pelayanan publik harus melibatkan tidak hanya indikator-indikator kuantitatif, tetapi juga kualitatif yang mencerminkan pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas dalam implementasi reformasi birokrasi, penting untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat memperkuat kapasitas administratif dan mendukung upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Dengan demikian, pembahasan ini menyoroti pentingnya memahami dinamika politik administrasi dalam konteks reformasi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik. Melalui analisis yang cermat dan pendekatan yang holistik, kita dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, perlunya penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses reformasi birokrasi juga merupakan hal yang sangat penting. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum dan kebebasan berbicara, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan politik dan administratif yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks reformasi birokrasi, partisipasi publik dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih baik.

Selain itu, reformasi birokrasi juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi memperhitungkan aspek-aspek keberlanjutan, seperti perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses reformasi birokrasi, pelayanan publik dapat diselaraskan dengan tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas.

Selain itu, perlu juga diakui bahwa reformasi birokrasi bukanlah proses yang bersifat statis, tetapi merupakan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur dampak dari reformasi birokrasi dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian lebih lanjut.

Dalam konteks globalisasi dan transformasi teknologi, reformasi birokrasi juga perlu memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global dan nasional. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik, tetapi juga membawa tantangan baru terkait dengan privasi data dan keamanan informasi yang perlu diatasi.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas. Faktor-faktor seperti korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik politik dapat menjadi hambatan dalam implementasi reformasi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada bukti untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mencapai tujuan-tujuan reformasi birokrasi yang lebih luas.

Dengan demikian, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi reformasi birokrasi tidaklah mudah dan sering kali melibatkan berbagai tantangan yang kompleks. Melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi, keberlanjutan, dan inovasi teknologi, kita dapat meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah perlu melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional, dalam proses reformasi birokrasi. Partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat memberikan sudut pandang yang beragam dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhitungkan berbagai kepentingan dan aspirasi yang ada.

Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat kapasitas institusi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pegawai negeri serta investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Evaluasi terhadap implementasi reformasi birokrasi juga penting dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan reformasi tercapai dan bahwa ada pembelajaran yang berkelanjutan dari pengalaman yang ada. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di masa mendatang.

Dalam konteks globalisasi, perubahan lingkungan eksternal juga perlu diperhitungkan dalam merancang dan melaksanakan reformasi birokrasi. Perubahan dalam dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tantangan-tantangan baru dalam tata kelola global dapat memengaruhi kebijakan dan strategi reformasi birokrasi.

Penting untuk mengambil pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam reformasi birokrasi yang memperhitungkan keberagaman dan kompleksitas masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

Reformasi birokrasi juga harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada efisiensi administratif, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang lebih besar.

Penting juga untuk mendorong inovasi dan eksperimen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pendekatan yang inovatif dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks dan meningkatkan daya saing dan adaptabilitas sistem birokrasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terus terjadi.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi birokrasi dapat membantu memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas independen yang memantau pelaksanaan reformasi birokrasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah.

Reformasi birokrasi juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan manfaat dari reformasi birokrasi.

Terakhir, reformasi birokrasi harus diarahkan pada menciptakan budaya kerja yang inklusif, berorientasi pada pelayanan, dan berbasis pada prinsip-prinsip etika dan integritas. Hanya dengan adanya budaya kerja yang kuat dan nilai-nilai yang ditanamkan, reformasi birokrasi dapat berhasil menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam banyak kasus, resistensi terhadap reformasi birokrasi dapat muncul dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dalam mempertahankan status quo. Hal ini bisa disebabkan oleh kekhawatiran akan kehilangan kontrol politik atau kekuasaan, atau karena adanya jaringan patronase yang terbangun di dalam birokrasi yang ingin dipertahankan. Oleh karena itu, proses reformasi birokrasi seringkali memerlukan negosiasi politik yang kompleks dan strategi persuasif untuk mengatasi resistensi tersebut.

Selain faktor politik, aspek kelembagaan juga memainkan peran penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Sistem birokrasi yang lemah atau korup cenderung menjadi hambatan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi sering kali melibatkan restrukturisasi institusi dan perubahan dalam kebijakan dan prosedur administratif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar.

Namun, perubahan kelembagaan tidaklah cukup. Penting juga untuk memperhatikan aspek budaya organisasi dalam proses reformasi birokrasi. Budaya organisasi yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan pelayanan publik, serta mengutamakan

integritas dan profesionalisme, diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi implementasi reformasi birokrasi.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, reformasi birokrasi adalah langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks tinjauan politik administrasi, proses reformasi birokrasi tidak hanya melibatkan perubahan struktural dalam lembaga pemerintah, tetapi juga mencakup aspek politik, kelembagaan, dan budaya organisasi.

Pertama, reformasi birokrasi memerlukan dukungan politik yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, legislator, dan masyarakat sipil. Proses reformasi sering kali diwarnai oleh dinamika politik yang kompleks, termasuk resistensi dari pihak yang memiliki kepentingan politik dalam mempertahankan status quo.

Kedua, aspek kelembagaan memainkan peran penting dalam reformasi birokrasi. Sistem birokrasi yang lemah atau korup dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi seringkali melibatkan restrukturisasi institusi dan perubahan kebijakan administratif.

Ketiga, budaya organisasi juga penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Budaya yang memprioritaskan pelayanan publik, integritas, dan profesionalisme diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi implementasi reformasi birokrasi.

Keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam proses reformasi birokrasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, reformasi birokrasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara keseluruhan.

Terakhir, reformasi birokrasi bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih besar. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu disusun dan dilaksanakan secara holistik, sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang negara tersebut. Dengan demikian, reformasi birokrasi dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*.
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.

- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). *Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Wahyudi, A., & Tarigan, R. S. (2022). *SISTEM INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEB PADA SMP NUSA PENIDA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.

- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.